

VOL. 19 . NO.1 MARET 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)
NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ‘ULA (STAIM)

NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi adalah jurnal yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Mitahul 'Ula (STAIM) Nganjuk. Terbit Pertama Kali tahun 2002.

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun, yakni pada bulan maret dan september.

Kami mengundang para peneliti, akademisi dan pemerhati keilmuan untuk menyumbang artikel yang sesuai dengan standar ilmiah. Redaksi berhak melakukan revisi tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. **Alamat Redaksi:** JL. KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono Nganjuk. Telp/Fax: (0358)552293; Email: staimlentera@gmail.com

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal
LENTERA
Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Editorial Team

Editor-in-Chief	: Lulud Wijayanti	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Managing Editors	: Aan Nasrullah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Editorial Board	: Moh. Sulhan	(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
	: Subandi	(IAIN Raden Intan Lampung)
	: Hujair AH. Sanaky	(UII Yogyakarta)
	: Muhammad Thoyib	(IAIN Ponorogo)
	: Nur Fajar Arif	(UNISMA Malang)
Editors	: Ismail S. Wekke	(STAIN Sorong Papua)
	: Rony Harsoyo	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Mukhlisin	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Nilna Fauza	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Saini	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Yuli Khoirul Umah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
IT Support	: Aminul Wathon	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

CONTENTS

Samuel Charlies Mowoka <i>Islam Nusantara Dan Islam Di Nusantara: Perkembangan Islam Sejak Masuknya Sampai Kini</i>	1-16
Qoyimatul Mufidah, dkk <i>Ulama Perempuan Dalam Paradigma Fiqih Patriarkis</i>	17-25
Lalu Bagus Prihatin Pujasetiandi, Diswandi, Luluk Fadliyanti <i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah</i>	26-44
Alfi Ma'rifatun Nisa <i>Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Wonosobo (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Batur, Dieng, Wonosobo)</i>	45-53
Abdul Farid, Hailuddin, dan Wahyunadi <i>Analisis Determinan Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016</i>	54-68
Ana Choerunisak <i>Tradisi Rejeban Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Jawa Tengah</i>	69-74
Dhina Megayati <i>Konsep Perbuatan Cabul Dalam Kebijakan Hukum Pidana</i>	75-92
Zainul Hadi, Mansur Afifi, Taufiq Chaidir <i>Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2014.6-2019.12</i>	93-113
Zainal Arifin dan Luluk Indarinul Mufidah <i>Perkembangan Masyarakat Berbasis Multikultural Dimensi Horizontal</i>	114-130
Solihin <i>Manajemen Permodalan BMT di Masa Pandemi Covid-19</i>	131-142

PERKEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS MULTIKULTURAL DIMENSI HORIZONTAL

Oleh:

Zainal Arifin¹ dan Luluk Indarinul Mufidah²

Email :zainalarifin061169@gmail.com

Abstract

This study is to analyze how the development of Indonesian society is based on multicultural horizontal dimensions. The development of a multicultural-based society can be said to be a change from the social symptoms that exist in a multicultural society, where these communities can live side by side peacefully (peaceful coexistence) in cultural differences. The characteristics of a multicultural based society are as follows: (1); The occurrence of segmentation in the form of groups that often have sub-cultures that are different from one another (2); Has a social structure divided into non-complementary institutions (3); Lack of developing consensus among its members on basic values (4); Relatively, they often experience conflicts between one group and another (5); Relatively, social integration grows on coercion and dependence in the economic field and (6), there is political domination by one group over other groups. The development of a multicultural based society with horizontal dimensions in Indonesia is at; (a) Nationtribes plurality, (b) Religious plurality: (1) Hindu-Buddhist influence, (2) Islamic Cultural Influence, (3) Western Cultural Influence, (c) Geographical Environment Influence

Keywords: Community Development, Multicultural, Horizontal Dimensions

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakatnya yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang sangat kompleks. Clifford Geertz, 1996 mengakui sulit melukiskan anatomi Indonesia secara persis. Negara ini, bukan saja multi-etnis (seperti Dayak, Kutai, Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), tetapi juga menjadi medan pertarungan pengaruh multimental dan ideologi (seperti India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Budhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalisme, dan seterusnya). Geertz melukiskan Indonesia sebagai sejumlah “bangsa” dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang

¹ Dosen Tetap STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk

² Dosen Tetap STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk

melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.³

Secara empirik, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk. Dalam kajian Furnival, 1984 masyarakat majemuk (*plural society*) adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik yang tunggal.⁴ Bahkan Hefner, 2007 memperkuat pernyataan Furnival di atas dengan menggambarkan tantangan pluralisme budaya yang dimiliki Indonesia secara lebih mencolok dan dianggap sebagai lokus klasik bagi bentukan masyarakat majemuk.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk itu, ada dua istilah yang penting dipahami yaitu kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas). Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, dan bukan ketunggalan.⁵ Artinya, dalam “masyarakat Indonesia” dapat dijumpai berbagai subkelompok masyarakat yang tidak bisa disatu kelompokkan satu dengan yang lainnya. Adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu. Demikian pula halnya dengan kebudayaan mereka. Sementara heterogenitas yang merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya.⁶ Keragaman tersebut tentu dapat merupakan sebagai sebuah kekuatan, namun tak jarang justru menjadi sebuah ancaman. Sejak bangsa ini diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, lebih-lebih pada periode Reformasi (sejak 1999 hingga sekarang) gejala itu telah tampak dengan kasat mata. Ia bisa berupa konflik etnik, konflik agama, atau identitas lainnya yang sering dipopulerkan dengan istilah konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan).

Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.⁷ Berdasarkan paparan di atas, maka penulis akan

³ Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia* (terj.), (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FS UI, 1981), Hal, 102

⁴ Hefner, Robert W. *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli “*The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*”. (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Hal, 2007

⁵ Kusumohamidjojo, B. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. (Jakarta: Grasindo, 2000). Hal, 55

⁶ Ibid, 56

⁷ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hal, 91.

membahas tentang bagaimana perkembangan masyarakat berbasis multikultural dimensi horizontal.

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Masyarakat Multikultural

Salah satu agenda reformasi masyarakat Indonesia ialah menegakkan suatu hidup bersama yang demokratis, mengakui akan martabat manusia yang sama (*human dignity*), menghormati akan keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, dan bertekad untuk membangun kesatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia baru itu adalah masyarakat multicultural (*multicultural society*) Indonesia yang semakin meneguhkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai upaya untuk membangun integrasi dan demokrasi Indonesia.⁸

Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai multicultural nation-state dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai monocultural nationstate. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap zamannya itu. Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yang secara substantif dan prosedural menghargai persamaan dalam perbedaan dan persatuan dalam keberagaman, secara konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut.

Konsep masyarakat multikultural (*multicultural society*) perlu dibedakan dengan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat.⁹ Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat. Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi

⁸ Arif Dikdik Baehaqi, *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap ompetensi Kewarganegaraan*. Tesis SPs UPI: Tidak diterbitkan. Tahun 2008

⁹ Abdillah S, Ubed, *Politik Identitas Etnik : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. (Magelang : Indonesiatera, 2002). Hal, 45

keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Masyarakat multikultural sebagaimana menurut Comte mengatakan bahwa “masyarakat seperti organisme hidup. Ini dapat diartikan bahwa didalam dinamika hidup, tumbuh dan berkembangnya masyarakat itu berlaku konsep sistem sehingga masyarakat itu terus berlangsung dan dapat bertahan sebagaimana kelangsungan hidup organisme”.¹⁰ Masyarakat majemuk (*plural society*) belum tentu dapat dinyatakan sebagai masyarakat multikultural (*multicultural society*), karena bisa saja di dalamnya terdapat hubungan antarkekuatan masyarakat varian budaya yang tidak simetris yang selalu hadir dalam bentuk dominasi, hegemoni dan kontestasi. Konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru. Sekitar 1970-an, gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada. Kemudian diikuti Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lain-lainnya.

2. Karakteristik Masyarakat Berbasis Multikultural

Karakteristik utama masyarakat multikultur menurut Furnivall 1949 adalah orang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial budaya mereka terpisah dan tidak bergabung dalam suatu unit politik. Furnivall adalah sarjana yang pertama menemukan dan memperkenalkan terminologi masyarakat multikultur melalui penelitiannya terhadap masyarakat Nederland Indie atau Indonesia tahun 1940.

Dalam studinya Furnivall memperlihatkan gambaran masyarakat sebagai masyarakat multikultur yang menarik. Masyarakat Indonesia di masa kolonial diperintah oleh kelompok ras yang berbeda. Penduduk asli terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang secara sosial, politik, dan ekonomi terpisah. Ratusan kelompok etnis hidup di kawasan teritorial tersendiri dengan bahasa, sistem sosial budaya yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lain serta tersebar di kepulauan Nederland-Indie yang begitu luas. Contoh lain yang dikemukakan Furnivall adalah masyarakat multikultur dalam negara-negara (yang waktu itu sudah merdeka), tetapi masyarakatnya masih tetap terpisah-pisah secara fungsional dalam unit-unit ekonomi. Menurut Furnivall kelompok-kelompok ekonomi itu hidup menyendiri dalam masyarakat negara tersebut sesuai dengan sistem sosialnya masing-masing.¹¹

Pemisahan tersebut seperti juga dalam kasus masyarakat multikultural di Indonesia yang disebabkan oleh adanya perbedaan ras, etnik, adat istiadat, bahasa daerah atau agama. Kanada adalah contoh yang baik untuk dua kelompok masyarakat yang dipisahkan oleh ras Perancis, Inggris, dan Irlandia, dengan nama Protestan dan Katholik. Sedangkan di Eropa Utara masyarakat banyak dipisahkan oleh faktor ekonomi atau okupasi.

¹⁰ Usman Pelly dan Asih Menanti. *Teori Sosial Budaya*. (Jakarta : Dirjen Dikti Depdiknas.1994). Hal, 142

¹¹ *Ibid*, 94

Sementara di India, Muangthai, dan Cina kelompok-kelompok masyarakatnya dipisahkan oleh kasta agama. Dalam kaitan yang sama Nathan Glazer mengemukakan bahwa karakter multikulturalisme yang ada di dalam masyarakat merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk toleransi dan demokrasi politik di dunia yang di atasnya tumbuh konflik antara kebudayaan karena perbedaan nilai. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karakter multikultural sangat mengemuka, keragaman etnik yang berada di dalamnya mengandung dimensi multibudaya.

Kita tidak dapat mengatakan bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat multikultural jika kita tidak mempunyai kelompok-kelompok etnik yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai-nilai, adat istiadat, dan tata kelakuan yang diakui sebagai pengetahuan dan jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas. Masyarakat modern sering dihadapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diterimanya perbedaan budaya.¹² Hal tersebut sering disebut tantangan multikulturalisme. Multikulturalisme mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda dan masing-masing memiliki tantangan tersendiri. *Fourth National Conference of the Federation of Ethnic Councils of Australia* menyatakan bahwa karakter masyarakat multikultural adalah sebagai berikut: 1). Adanya variasi dari perbedaan budaya. 2). Kebebasan dalam menjalankan perbedaan beragama. 3). Bahasa dan adat sosial yang berbeda. 4). Adanya kepedulian dalam berbagai nilai, dan 4). Semua kelompok etnik menekankan toleransi budaya, bahasa, dan agama meskipun berbeda antara satu dengan yang lainnya agar mereka tidak kehilangan identitas

Sedangkan menurut Menurut Pierre L. Van den Berghe masyarakat multikultural memiliki karakteristik umum, sebagai berikut: (1); Terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang satu sama lain berbeda (2); Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer (3); Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar (4); Secara relative, sering kali mengalami konflik- konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya (5); Secara relatif, integrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan ketergantungan didalam bidang ekonomi dan (6), Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain.¹³

¹² Wiil Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*. (Jakarta : LP3ES, 2003), Hal, 13

¹³ Nurseno, *Theory and application of Sosiologi 2*. (Solo: Bilingual, 2009), Hal, 184

3. Perkembangan Masyarakat Berbasis Multikultural Dimensi Horizontal

Secara histories, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut “era reformasi”, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Dalam pandangan Azyumardi Azra, bahwa krisis moneter, ekonomi, dan politik yang bermula sejak akhir 1997, pada gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenun masyarakat (*fabric of society*) tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat. Krisis sosial budaya yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita, misalnya : disintegrasi social-politik yang bersumber dari euphoria kebebasan yang nyaris kebablasan; lenyapnya kesabaran social (*social temper*) dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki; merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkoba dan penyakit-penyakit sosial lainnya; berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber atau sedikitnya bernuansa politis, etnis dan agama seperti terjadi di Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku Sulawesi Tengah, dan lain-lain.

a. Pluralitas Sukubangsa

Keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau yang tersebar disuatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas sukubangsa di Indonesia. Ketika nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai emigran dari daerah yang sekarang kita kenal sebagai daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira 2.000 tahun sebelum masehi, keadaan geografis serupa itu telah memaksa mereka untuk harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lain.

Isolasi geografis yang demikian di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan sukubangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan sukubangsa yang lain. Tiap kesatuan sukubangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri. Dengan perkecualian yang sangat kecil , mereka pada umumnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih daripada itu, mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka

memiliki asal-usul keturunan yang sama, satu kepercayaan yang seringkali di dukung oleh mitos-mitos yang hidup di dalam masyarakat.

Tentang berapa jumlah sukubangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai-bagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kamsyarakatan. Hidred Geertz, 1983, misalnya, menyebutkan adanya lebih dari 300 sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Skinner, 1959 menyebutkan adanya lebih dari 35 sukubangsa menurut kajian induk bahasa dan adat yang tidak sama, Van Vollenhoven, 1949 mengemukakan sekurangnya ada 19 daerah pemetaan menurut hukum adat yang berlaku Kendati angka-angka tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan pada puluhan tahun yang lalu; akan tetapi dengan perkiraan bahwa angka kelahiran dan angka kematian selama ini memiliki rata-rata yang sama bagi kebanyakan sukubangsa yang ada di Indonesia, maka angka-angka tersebut di atas barangkali masih dapat menggambarkan keadaan masa kini.

Dalam pada itu, mengikuti pengertian sukubangsa sebagaimana tersebut di atas, baik orang-orang Tionghoa yang datang terdahulu, ataupun mereka yang datang kemudian secara suka rela melalui media perdagangan, maupun yang didatangkan oleh kolonial Belanda yang maksudnya diperbantukan dalam sektor perdagangan, agaknya tidak bisa lagi dilihat sebagai kelompok luar masyarakat; keberadaan mereka di bumi Indonesia ini telah turun menurun untuk beberapa generasi, menganggap diri sebagai penduduk di negeri ini, memutuskan untuk kemudian menetap secara utuh dengan berusaha melebur dalam budaya Indonesia; walau masih ada ikatan-ikatan emosional dengan negeri leluhurnya, tercermin dalam beberapa unsur kebudayaan yang masih kuat melekat dalam kehidupannya, namun karena secara fisik tidak ada lagi hubungan-hubungan dengan tanah asal mereka atau orang-orang yang tinggal di sana, maka lambat laun orang-orang Tionghoa ini lebih mengakui sebagai bagian dari masyarakat Indonesia daripada masyarakat Tionghoa. Walaupun secara kuantitas (jumlah jiwa) sedikit, akan tetapi umumnya kedudukan mereka sangat kuat di sektor ekonomi dan sangat berpengaruh pada hubungannya dengan sukubangsa-sukubangsa lain di Indonesia, yang sebagai keseluruhan biasanya ditempatkan sebagai golongan pribumi.

b. Pluralitas Agama

Faktor kedua, yaitu kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara samudera Indonesia dan samudera Pasifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena letaknya yang berada di

tengah-tengah lalu-lintas perdagangan laut melalui kedua samudera tersebut, maka masyarakat Indonesia telah sejak lama sekali memperoleh berbagai-bagai pengaruh kebudayaan bangsa lain melalui para pedagang asing, dari mulai pengaruh kebudayaan India, Cina, Persia, sampai Eropa; sedangkan Jepang yang pernah menduduki Indonesia untuk beberapa tahun agak kurang berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat setempat.

Semua pengaruh kebudayaan tersebut kita jumpai dalam bentuk pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Di luar Jawa, hasilnya kita lihat pada timbulnya golongan *Islam modernis* terutama di daerah-daerah yang strategis berada di dalam jalur perdagangan internasional pada waktu masuknya reformasi agama Islam, golongan *Islam konservatif-tradisionalis* ditemukan di daerah-daerah pedalaman, dan golongan Kristen Katolik dan Protestan di daerah-daerah Maluku, Nusatenggara Timur, Sulawesi Utara, Tapanuli, dan sedikit di daerah Kalimantan Tengah; serta golongan Hindu Bali (Hindu-Dharma) terutama di pulau Bali.

Di pulau Jawa, kita jumpai golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan kebudayaan pantainya, serta sebagian besar daerah Jawa Barat; golongan Islam konservatif-tradisionalis di daerah-daerah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan golongan Islam nominal yang biasa disebut dengan golongan Islam Abangan, terutama di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta golongan minoritas kristen yang tersebar hampir di setiap daerah perkotaan di Jawa.

c. Pengaruh Hindu-Budha.

Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun sebelum masehi. Hinduisme dan Budhisme, pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah lama hidup. Namun demikian terutama di pulau Jawa dan pulau Bali pengaruh agama Hindu dan Budha itu tertanam dengan kuatnya sampai saat ini. Cerita seperti *Mahabharata* atau *Ramayana* sangat populer sampai sekarang, bahkan pada beberapa sukubangsa seperti Sunda, Jawa, atau Bali, pengaruh cerita-cerita itu sudah dianggap sebagai bagian atau ciri dari kebudayaannya; beberapa film Indonesia ternyata banyak yang berorientasi pada sifat-sifat film India, yaitu antara bernyanyi dan menari; musik *dangdut* yang demikian populer untuk lapisan masyarakat tertentu, bisa dikatakan berakar dari kebudayaan India. Pengaruh yang paling menonjol dari agama Hindu bisa ditemukan pada masyarakat Bali,

walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan karena tentunya unsur budaya asli masih dipertahankan, namun pengaruh agama Hindu tertanam kuat pada kepercayaan masyarakat Bali; secara umum kalau kita berbicara tentang Hindu di Indonesia, hampir dipastikan jawabannya pasti Bali, jadi agak mengherankan kalau kita pada satu saat menemukan orang Bali yang beragama lain, walaupun ada tetapi populasinya sedikit.

d. Pengaruh Kebudayaan Islam

Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke 13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke 15. Pengaruh agama Islam terutama memperoleh tanah tempat berpijak yang kokoh di daerah-daerah di mana pengaruh agama Hindu dan Budha tidak cukup kuat. Di daerah Jawa tengah dan Jawa Timur, dimana pengaruh agama Hindu dan Budha telah tertanam dengan cukup kuat, suatu kepercayaan keagamaan yang bersifat sincretic dianut oleh sejumlah besar penduduk di kedua daerah tersebut, dimana kepercayaan animisme-dinamisme bercampur dengan kepercayaan agama Hindu, Budha dan Islam. Pengaruh reformasi agama Islam yang memasuki Indonesia pada permulaan abad ke 17 dan terutama pada akhir abad ke 19 itupun tidak berhasil mengubah keadaan tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agama Islam di daerah-daerah yang sebelumnya memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu Bali masih tetap merupakan daerah pengaruh agama Hindu.

Praktik penyebaran agama Islam itu melalui dua proses, yaitu melalui mekanisme perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang India dari Gujarat dan orang-orang Persia, dan yang kedua melalui penguasaan sentra-sentra kekuasaan di pulau Jawa oleh orang-orang Pribumi yang telah memeluk agama Islam; dengan proses yang cukup rumit ini tidak mengherankan kalau kemudian terdapat beberapa perbedaan proses penyerapan agama Islam ini di Indonesia.¹⁴ Untuk orang-orang yang tinggal di daerah pesisir agak berbeda dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman; untuk orang-orang yang telah kuat memeluk agama Hindu dan Budha agak berbeda dengan orang-orang yang lebih longgar darinya; untuk yang menerimanya dari orang-orang Gujarat agak berbeda dengan pengaruh Persia; bahkan menurut seorang peneliti Amerika tentang kebudayaan-kebudayaan di Indonesia, Clifford Geertz 1989, keberadaan agama Islam pada suatu masyarakat Jawa Tengah itu dilaksanakan menurut tiga lapisan masyarakat, yaitu agama

¹⁴ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*. (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2006). Hal, 23

Islam yang hidup pada kelompok bangsawan yang disebutnya sebagai *Priyayi*, Islam yang hidup pada kelompok rakyat kebanyakan yang disebutnya sebagai *Abangan*, dan Islam yang hidup pada anggota-anggota kelompok pesantren sebagai pusat pengkajian agama Islam yang disebut *Santri*.

e. Pengaruh Kebudayaan Barat.

Pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke 16, kedatangan mereka ke tanah Indonesia ini karena tertarik dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah di daerah kepulauan Maluku, rempah-rempah ini adalah sebagai barang dagangan yang sedang laku keras di Eropa pada saat itu. Kegiatan misionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katolik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis untuk meninggalkan Indonesia pada sekitar tahun 1600 M, maka pengaruh agama Katolik pun segera digantikan oleh pengaruh agama Protestan. Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama jika dibandingkan dengan bangsa Portugis, telah mengakibatkan pengaruh agama Protestan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu, sekalipun bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan politiknya tidak kurang selama 350 tahun lamanya di Indonesia.

f. Pengaruh Lingkungan Geografis

Iklim yang berbeda-beda dan struktur tanah yang tidak sama di antara berbagai daerah di kepulauan Nusantara ini, merupakan faktor yang menciptakan pluralitas regional di Indonesia. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda di Indonesia, yakni : daerah pertanian sawah (*wet rice cultivation*) yang terutama banyak dijumpai di pulau Jawa dan Bali, serta daerah pertanian ladang (*shifting cultivation*) yang banyak dijumpai di luar Jawa. Perbedaan lingkungan ekologis tersebut menjadi sebab bagi terjadinya kontras antara Jawa dan luar Jawa di dalam bidang kependudukan, ekonomi, dan sosial budaya.

Kontras antara daerah Jawa dengan luar Jawa diperkuat lagi dengan perbedaan-perbedaan yang cukup tajam di antara kedua daerah tersebut di bidang sosial-budaya; kesuburan tanah dan sistem pertanian yang lebih intensif di pulau Jawa telah menjadi landasan bagi pentingnya peranan daerah tersebut pada masa-masa yang telah lalu. Oleh karena sistem pertanian yang intensif berkembang disana. Maka desa-desa di Jawa tidak mungkin sepenuhnya dapat berdiri sendiri-sendiri

sebagai *selfsufficeint unit*. Sistem pertanian yang demikian, sebaliknya, justru membutuhkan kerja sama lebih besar untuk memelihara sistem irigasi diantara desa-desa yang tergantung kepada sistem irigasi tersebut. Keadaan serupa itu lebih lanjut membutuhkan suatu unit kemasyarakatan yang lebih besar untuk mengintegrasikan berbagai-bagai desa tersebut. Maka berkembanglah dipulau Jawa kerajaan- kerajaan yang didukung oleh sejumlah besar desa-desa sebagai pembayar pajak, sementara kerajaan sebaliknya memberikan pelayanan birokrasi, perlindungan dan tuahnya kepada masyarakat sebagai imbalannya.

Di atas landasan pola itulah maka perkembangan lebih lanjut tidak saja menempatkan kerajaan dengan raja beserta para bangsawan yang ada di sekitarnya sebagai pusat pemerintahan, melainkan juga sebagai pusat kebudayaan. Pengaruh Hinduisme dan Budhaisme yang datang dari India jauh sebelum kedatangan Islam ke pulau Jawa telah memperkokoh sistem tersebut; dibawah pengaruh Hinduisme dan Budhaisme, maka sistem aristokrasi menjadi semakin tegas dan terinci dengan konsep tentang kerajaan yang bersifat suci dan mengandung kekuatan magis sebagai landasannya. Proses tersebut berjalan terus dan mencapai kematangannya justru pada awal kedatangan orang-orang kulit putih di Indonesia. Sebagai akibat terdesaknya pengaruh perdagangan laut oleh masuknya orang-orang kulit putih di perairan Indonesia, maka sejak abad ke 17 kebudayaan Jawa berpaling dari dunia luar, membalik ke dalam, dan semata-mata menuju ada upaya mempertinggi dan memperluas kehidupan keraton. Pemusatan kaum bangsawan dalam keraton memperkuat hal itu. Kendati sifat keningratan kebudayaan Jawa bukan baru timbul pada waktu itu, akan tetapi ia mencapai tingkatnya yang tinggi pada waktu itu.

Berbeda sekali dengan sistem pertanian sawah di Jawa yang mendorong tumbuhnya suatu tertib kemasyarakatan yang mendasarkan diri di atas kekuasaan di daratan, maka sistem pertanian ladang diluar Jawa telah mendorong tumbuhnya suatu sistem kemasyarakatan yang mendasarkan diri di atas kekuasaan di lautan melalui keunggulan di dalam lapangan perdagangan. Apabila di Jawa pernah tumbuh kekuasaan Majapahit yang gemilang, maka di luar Jawa pernah pula berkembang kerajaan Sri Wijaya yang cemerlang.

Pemerintah Hindia-Belanda yang berlangsung tidak kurang dari 350 tahun itu bukannya meniadakan kontras antara Jawa dan luar Jawa, melainkan membiarkannya demikian. Maka sejak abad ke 18 tekanan dari pada perdagangan Belanda berpindah dari daerah Maluku ke pulau Jawa. Sejak saat itu

pengawasan pemerintah Hindia-Belanda terhadap daerah-daerah di luar Jawa menjadi lebih bersifat tidak langsung. Akibat yang timbul dari keadaan ini kontras antara Jawa dan luar Jawa, untuk tidak mengatakan mengukuhkannya.

Pola perdagangan yang telah tumbuh lama sebelum itu tetap terpelihara di daerah-daerah luar Jawa, sementara kekuasaan langsung pemerintah Hindia-Belanda di pulau Jawa telah mematikan kegiatan perdagangan penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya untuk kepentingan mencukupi kebutuhan tenaga-tenaga administratif yang murah bagi kepentingan pemerintah Hindia-Belanda, maka penduduk pulau Jawa lebih banyak direkrut ke dalam kehidupan birokrasi daripada yang dialami oleh rekan-rekannya di luar pulau Jawa.

Kebanyakan dari mereka berasal dari golongan elit tradisional, yang sejak dilaksanakannya 'politik etnis' banyak memperoleh kesempatan memasuki pendidikan Barat. Oleh karena itu apabila usahawan-usahawan pribumi banyak muncul dari daerah-daerah luar Jawa, maka kaum birokrat justru lebih banyak tumbuh di pulau Jawa. Semuanya itu tetap merupakan faktor yang sangat memengaruhi persoalan-persoalan hubungan antara daerah di Indonesia sampai saat ini.

g. Pengaruh Kota terhadap Desa

Satu konsekuensi dari semakin berkembang dan terbukanya sarana-sarana transportasi dan komunikasi antara teritorial kota dengan desa, adalah tingkat intensitas interaksi sosial desa-kota menjadi semakin tinggi; menurut Bintarto, 1984 intensitas interaksi sosial ini berdasar pada keadaan dimana pada satu sisi, penduduk kota sangat berkepentingan dengan sumber-sumber makanan yang ada di pedesaan (*hinterland*), sehingga dengan keadaan itu seolah-olah memaksa mereka proaktif untuk membuka sentra-sentra kebutuhan ini di daerah pedesaan, berbagai infrastruktur diadakan untuk mempermudah proses pendistribusian bahan-bahan pokok ini; pada sisi yang lain, penduduk desa juga merasa berkepentingan dengan komunitas kota, terutama yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi. Konsekuensi logis dari intensitas interaksi sosial tersebut adalah pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan pada masing-masing kelompok yang berinteraksi; dalam banyak kejadian agaknya komunitas pedesaan yang lebih banyak menanggapi perubahan itu bila dibandingkan dengan komunitas kota yang relatif tidak mendapat pengaruh apa-apa dari proses ini.

Salah satu bias dari konsep tentang urbanisasi seperti yang menyatakan

beberapa pengertian urbanisasi yaitu sebagai:¹⁵

- 1) Arus perpindahan penduduk ke kota, adanya migrasi dari daerah-daerah lain menuju ke kota.
- 2) Bertambah besarnya jumlah penduduk kota yang non agraris di sektor industri dan sektor informal
- 3) Tumbuhnya pemukiman-pemukiman menjadi kota
- 4) Meluasnya pengaruh kota di pedesaan mengenai segi ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis.

Dengan mengacu pada pengertian pada pengaruh kota di pedesaan di atas, secara tidak langsung pernyataan itu juga mengungkapkan bahwa pengaruh kota terhadap desa juga menyangkut nilai-nilai yang berhubungan dengan mentalitas, gagasan, sikap, dan tindakan-tindakan masyarakat desa terhadap seperangkat nilai-nilai yang mungkin *dianggapnya* lebih bermanfaat dari yang ada. Pengaruh urbanisasi ini bisa berarti pemberlakuannya pada penduduk perdesaan yang tinggal di daerah pedesaan dan pada penduduk perdesaan yang tinggal di daerah perkotaan; untuk yang terakhir, tidak demikian menimbulkan masalah karena kehidupan kota memang menuntut orang untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang hidup disana; namun untuk yang pertama, ternyata banyak menimbulkan masalah, dimana orang tidak lagi memilih dan memilah nilai-nilai mana yang baik dan yang buruk.

Modernisasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia menuntut keterlibatan segenap anggota masyarakat untuk semua berpartisipasi dalam proses pembangunan, segenap elemen- elemen dalam masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk sama-sama membangun, tidak terkecuali masyarakat-masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok perdesaan; bahkan bak ‘gayung bersambut’ masyarakat perdesaan menanggapi dengan reaksi yang sangat positif, banyak orang desa yang kemudian berbondong-bondong datang ke kota untuk mengadu nasib. Dua keadaan yang menjadi dasar perpindahan penduduk desa ke kota itu, pertama faktor-faktor pendorong (*push factors*) di pedesaan, dan kedua faktor-faktor penarik (*pull factors*) dari kota, dengan perinciannya sebagai berikut:¹⁶

Faktor-faktor yang mendorong orang desa meninggalkan tempat tinggalnya:

- 1) Di desa lapangan kerja pada umumnya sangat terbatas kurang, jumlah penduduk yang semakin bertambah tidak disertai dengan bertambahnya lahan-lahan

¹⁵ Didin Saripudin, *Mobilitas dan Perubahan Sosial*, Bandung. (Penerbit : Masagi Foundation, 2005), Hal. 23

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1998, Hal. 76

pertanian, keadaan ini menimbulkan suatu bentuk pengangguran tenaga kerja yang disebut sebagai ‘pengangguran tersamar’ (*disguised unemployment*),

- 2) Penduduk desa, terutama individu-individu yang menginjak dewasa, merasa tertekan oleh adat-istiadat yang mengakibatkan cara hidup yang monoton
- 3) di desa, tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan; oleh sebab itu banyak orang yang ingin maju, kemudian meninggalkan desa,
- 4) Rekreasi sebagai bagian penting dari kehidupan manusia, bentuknya dianggap tidak bisa lagi memenuhi aspirasi individu-individu di perdesaan.
- 5) Keinginan untuk mengembangkan usaha-usaha dari keterampilan-keterampilan tertentu selain bidang pertanian, di kota kemungkinan lebih besar.

Faktor-faktor yang menarik orang desa ke Kota:

- 1) Kebanyakan penduduk desa beranggapan kuat bahwa di kota banyak menyediakan lapangan kerja yang menghasilkan uang banyak, oleh karena sirkulasi uang di kota jauh lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak; maka relatif lebih muda untuk mendapatkannya daripada di desa,
- 2) Di kota lebih banyak kesempatan untuk mendirikan perusahaan industri dan lainnya, karena banyak lembaga-lembaga yang sanggup meminjamkan modal besar
- 3) Kelebihan modal di kota lebih banyak daripada di desa
- 4) Tersedianya berbagai macam pendidikan lanjutan, umum maupun kejuruan, bahkan untuk orang-orang yang berprestasi dan tidak mampu diberikan fasilitas beasiswa
- 5) Kota dianggap tempat yang kondusif untuk mengembangkan berbagai gagasan, yang mungkin kurang mendapat perhatian atau penghargaan bila diberlakukan di perdesaan
- 6) Kehidupan kota relatif bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup yang lebih baik, seperti kesehatan (dokter dan rumah sakit), listrik, air minum, rekreasi, dan lainnya.
- 7) Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang ‘lebih tinggi’ dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dan segala lapisan.

Pada saat modernisasi ini digulirkan, kota dipenuhi dengan orang-orang desa, kebanyakan dari mereka adalah untuk menuntut perbaikan hidup, dengan menimba ilmu dan mencari nafkah; mula-mula mereka tinggal untuk sementara waktu, tetapi setelah mendapatkan jalan hidupnya di kota mereka memutuskan untuk tinggal menetap. Orang yang sudah meninggalkan tempat tinggalnya di desa,

mempunyai kecenderungan untuk tetap tinggal di kota, terutama faktor transportasi yang menghambat mereka untuk pergi-pulang dari desa ke kota; mereka hanya akan kembali apabila ada hal-hal penting yang terjadi di desanya. Di dalam rangka ini, kemungkinan besar urbanisasi mengakibatkan perluasan kota, karena pusat kota tidak akan mungkin menampung perpindahan penduduk desa yang begitubanyak; timbullah tempat-tempat tinggal baru di pinggiran kota, proses ini dalam pengertian sosiologi dikenal dengan proses pembentukan *suburb*.

Sebaliknya, hubungan dengan kota, menyebabkan pula terjadinya perubahan di desa, karena orang-orang yang kemudian tinggal di kota, sekali-kali pulang juga ke desanya. Beberapa unsur kehidupan kota akan terbawa serta, sehingga ada pula rekan-rekan warga desa yang meniru gaya kehidupan orang kota, proses mana yang disebut sebagai *urbanisme*.

Urbanisasi yang terlampau pesat dan tidak teratur, mengakibatkan beberapa keadaan yang merugikan kota; penduduk desa yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota, menemukan kekecewaan yang besar; karena besarnya jumlah mereka yang mencari pekerjaan, maka timbul persaingan antara mereka sendiri yang ditambah pula dengan persaingan yang datang dari penduduk kota sendiri. Orang-orang desa tidak mengerti bahwa mereka ternyata harus berjuang sendiri; secara umum, nilai-nilai hubungan antar manusia di kota, khususnya tolong menolong yang berkenaan dengan profesi seseorang, agaknya kurang berlaku, kecuali untuk lingkup kelompok yang lebih kecil; agaknya, sukar menemukan orang lain yang dapat membantu.

Cita-cita yang muluk akhirnya terhambat, yang akhirnya juga mengakibatkan meningkatnya tuna karya. Masalah tuna karya sesungguhnya sangat pelik, oleh karena mempertajam perbedaan antara golongan yang punya dengan golongan yang tidak punya, suatu keadaan yang di daerah perdesaan jarang terjadi. Berbagai bentuk keadaan kemudian timbul dari masalah tuna karya ini, meningkatnya praktek-praktek tuna susila dan kriminalitas. Tuna susila dan kriminalitas yang mula-mula didorong atas dasar untuk mempertahankan hidup di kota, kemudian dapat berubah menjadi suatu pekerjaan tetap, sehingga timbullah organisasi-organisasi penjahat yang sangat sukar untuk dicegah dan diberantas. Tidak selamanya aktor-aktor tuna susila dan kriminalitas mengindikasikan keadaan 'orang desa yang hidup di kota', bahkan untuk beberapa kasus besar, justru orang-orang kota yang bahkan berasal dari lapisan atas yang menjadi pemeran utama dalam permainan kotor ini.

Urbanisasi merupakan proses yang wajar dan tidak perlu dicegah pertumbuhannya. Karena, proses urbanisasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, proses urbanisasi tersebut perlu diarahkan agar tidak terjadi masalah-masalah seperti tersebut di atas. Pada saat ini pemerintah telah mengembangkan dua kelompok kebijakan untuk mengarahkan proses urbanisasi, yaitu mengembangkan apa yang dikenal dengan istilah ‘urbanisasi pedesaan dan juga mengembangkan ‘pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru’.

C. Penutup

Perkembangan masyarakat berbasis multikultural dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat multicultural yang mana masyarakat tersebut dapat hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok, Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Karakteristik masyarakat berbasis multikultural sebagai berikut: sebagai berikut: (1); Terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang satu sama lain berbeda (2); Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer (3); Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar (4); Secara relative, sering kali mengalami konflik- konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya (5); Secara relatif, integrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan ketergantungan didalam bidang ekonomi dan (6), Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Perkembangan masyarakat berbasis multicultural berdimensi horizontal di Indonesia adalah pada; (a) Pluralitas Sukubangsa, (b) Pluralitas Agama : (1) Pengaruh Hindu-Budha, (2) *Pengaruh Kebudayaan Islam*, (3) Pengaruh Kebudayaan Barat, (c) Pengaruh Lingkungan Geografis.

DaftarPustaka

- Abdillah S, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnik : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang : Indonesiatara.
- Koentjaraningrat.1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. UI-Press.
- Saripudin, Didin 2005. *Mobilitas dan Perubahan Sosial*, Bandung. Penerbit : Masagi Foundation,

- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Hassan Shadily, 1998. *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andre Ata Ujan dkk, 2009. *Multikulturalisme : Belajar Hidup Bersama dalam perbedaan*
Jakarta : PT indeks.
- Havilland, William. 1993. *Antropologi : Edisi keempat jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Kymlicka, Will. 2003. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta : LP3ES.
- Nurseno, 2009. *Theory and application of Sosiologi 2*. Solo: Bilingual
- Mahfud Choirul. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Patji, Abdul Rachman. 2001. “*Primordialisme dalam Pluralitas Etnis*”, dalam *Indonesia menapak Masa Depan dalam Kajian Sosial dan Budaya*. Ed. Muhammad Hisyam. Jakarta : Peradaban.
- H. A. R. Tilaar. 2004. *Multikulturalisme : Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Grasindo
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Sosial*, Jakarta: CV Rajawali
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori Sosial Budaya*. Jakarta : Dirjen Dikti Depdiknas.
- Hardiman, F. B. 2002. *Belajar dari Politik Multikulturalisme*. Pengantar dalam Kymlicka. (2002). *Kewargaan Multikultur: Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas*. Terjemahan oleh Edlina Afmini Eddin dari judul *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority*. Jakarta: LP3ES.
- Yaqin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arif, Dikdik Baehaqi. 2008. *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap ompetensi Kewarganegaraan*. Tesis SPs UPI: Tidak diterbitkan.
- Hefner, Robert W. 2007. *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli “*The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*”. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumohamidjojo, B. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Nasikun. 2007. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suparlan, Parsudi. 2005. *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia* (terj.), Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FS UI.